




Research Article

Aksi Kamisan Sebagai Praktik Perlawanan Simbolik Terhadap Ketidakadilan di Ranah Jawa Barat

Hifdzi Syahril Mawardi¹, Ilyas Mulyana², Dadang Kusmana³, Muliadi⁴

1. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Syahrilhifdzi@gmail.com 
2. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; ilyasmulyana@gmail.com
3. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Dadangkuswana@gmail.com
4. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Muliadi@uinsgd.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 13, 2026
Accepted : April 15, 2026

Revised : March 19, 2026
Available online : May 18, 2026

How to Cite: Hifdzi Syahril Mawardi, Ilyas Mulyana, Dadang Kusmana, & Muliadi, M. (2026). Kamisan Action as a Symbolic Practice of Resistance Against Injustice in West Java. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 3(1), 44-52. <https://doi.org/10.61166/policy.v3i1.37>

Kamisan Action as a Symbolic Practice of Resistance Against Injustice in West Java

Abstract. Kamisan Action is a social movement that highlights symbolic resistance against government injustice and impunity. In West Java, this activity emerged as an alternative platform for the public to express political criticism using non-violent symbols such as black clothing, dark umbrellas, and standing still. This study investigates how Thursday Actions in several cities in West Java particularly Bandung function as a symbolic strategy to preserve collective memory of human rights violations and negotiate an increasingly restricted public space. Using a qualitative approach relying on observation and discourse analysis, the research reveals that this silent resistance is able to create new political meanings, strengthen solidarity between victims and advocates, and challenge state narratives that often normalize injustice. Thus, the Thursday Action in West Java not only functions as a memory ritual, but also as a symbolic resistance practice that continuously encourages

accountability and social justice. Human rights violations that began since the change of the Old Order to the New Order became the spark for an action to reveal the truth. Starting from the 1965 incident, the mysterious shooting incident of 1982-1985, the enforced disappearances of 1997-1998, the May 1998 tragedy, the Semanggi I tragedy (November 13, 1998), the Semanggi II tragedy (September 24, 1999), the Trisakti tragedy (May 12, 1998), the Munir murder case (September 7, 2004), and many other tragedies are examples of human rights violations whose resolution is still unclear.

Keywords: Thursday Action, Movement, Social, Order, Strategy, Symbolic, human rights violations

Abstrak. Aksi Kamisan adalah suatu bentuk gerakan sosial yang menyoroti perlawanan simbolis terhadap ketidakadilan dan impunitas pemerintah. Di Jawa Barat, kegiatan ini muncul sebagai wadah alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik politik dengan simbol-simbol non-kekerasan seperti busana hitam, payung gelap, dan aksi berdiri tenang. Studi ini menginvestigasi cara Aksi Kamisan di sejumlah kota di Jawa Barat—terutama Bandung—berfungsi sebagai strategi simbolis untuk melestarikan ingatan kolektif mengenai pelanggaran hak asasi manusia serta menegosiasikan ruang publik yang semakin terbatas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengandalkan observasi dan analisis wacana, penelitian ini mengungkapkan bahwa perlawanan sunyi ini mampu menciptakan makna politik baru, memperkuat solidaritas antara korban dan pendamping, serta menantang narasi negara yang sering kali menormalkan ketidakadilan. Dengan begitu, Aksi Kamisan di wilayah Jawa Barat tidak hanya berfungsi sebagai ritual memori, tetapi juga sebagai praktik perlawanan simbolis yang terus menerus mendorong akuntabilitas dan keadilan sosial. Pelanggaran hak asasi manusia yang dimulai sejak bergantinya Orde Lama ke Orde Baru menjadi pemantik sebuah aksi untuk mengungkap kebenaran. Mulai dari peristiwa 1965, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, penghilangan paksa 1997-1998, tragedi Mei 1998, tragedi Semanggi I (13 November 1998), tragedi Semanggi II (24 September 1999), tragedi Trisakti (12 Mei 1998), kasus pembunuhan Munir (7 September 2004), dan masih banyak tragedi lainnya adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia yang belum jelas penyelesaiannya.

Kata Kunci: Aksi Kamisan, Gerakan, Sosial, Orde, Strategi, Simbolis, Pelanggaran HAM

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menjamin kebebasan berpendapat untuk semua warganya, aksi demonstrasi sudah menjadi hal yang biasa sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada negara. Tindakan demonstrasi tidak selalu bersifat anarkis, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih teratur. Demonstrasi yang terstruktur seperti ini bisa dilakukan melalui aksi protes tanpa suara, contohnya adalah Aksi Kamisan. (Asiah, 2018) Tindakan ini pertama kali dilakukan pada 18 Januari 2007 yang dipimpin oleh Maria Catarina Sumarsih ibu dari Benardinus Rialino Nurma Irawan mahasiswa Universitas Atma Jaya.

Dalam suasana sosial dan politik yang selalu berubah, Aksi Kamisan muncul sebagai sebuah gerakan yang tidak hanya mencerminkan keprihatinan para keluarga korban karena tidak mendapatkan keadilan dari ketidakpastian sikap pemerintah, namun juga sebagai suatu bentuk perjuangan hak yang dicabut dan pengingat akan masa lalu yang kelam yang tidak boleh dilupakan. Dalam tulisan ini, kita akan membahas peran dan pengaruh Aksi Kamisan dalam mendukung hak asasi manusia di Indonesia. Kami mengharapkan individu yang masih belum paham atau kurang menyadari mengenai peraturan yang berkaitan dengan HAM bisa memperoleh

pengetahuan yang dapat membangkitkan wawasan dan pemahaman. Di samping itu, meningkatkan pemahaman tentang signifikansi HAM di negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini krusial karena setiap orang berhak atas kehidupan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Berikutnya melalui tulisan ini, kami juga berharap bisa memperluas wawasan mengenai Sejarah khususnya mengenai Aksi Kamisan. Seperti yang diungkapkan oleh Soekarno yaitu ambil garis JASMERAH yang artinya Jangan Pernah Melupakan Sejarah.

Dalam kerangka gerakan nasional dan demokrasi, Aksi Kamisan bisa dilihat sebagai lanjutan dari semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan ketidakadilan dan penindasan, mencerminkan nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman kemerdekaan, terutama dalam memperjuangkan hak-hak fundamental rakyat. Dengan cara yang damai dan secara konsisten, Aksi Kamisan merupakan bentuk ungkapan kebebasan berpendapat yang legal dalam negara demokratis, dengan lambang-lambang seperti payung dan baju hitam serta perilaku tak bersuara yang tangguh dalam komunikasi non-verbal.

Ibu Sumarsih (Maria Catarina Sumarsih) adalah tokoh sentral dalam Aksi Kamisan, demonstrasi payung hitam yang dilakukan setiap Kamis di depan Istana Negara sejak 2007, menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, terutama Tragedi Semanggi 1998 yang merenggut nyawa putranya, Wawan. Langkah ini dia inisiasi bersama keluarga korban lainnya seperti Suciwati (istrinya Munir) dan Bedjo Untung, sebagai upaya untuk melawan impunitas dan mendesak aparat negara agar mengusut tuntas kasus-kasus seperti Semanggi, Trisakti, dan pembunuhan Munir, sambil berharap semangat perjuangan ini diteruskan oleh generasi muda.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell W. (2003) menyatakan bahwa *"a qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e. the multiple meaning meaning of individual experiences, meaning socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or advocacy/participatory perspectives (i.e. political, issue-oriented, collaborative or change oriented) or both"* Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan di mana peneliti sering kali mengemukakan klaim pengetahuan yang berakar pada sudut pandang konstruktivis (beragam makna dari pengalaman individu, makna yang dibentuk secara sosial dan historis, dengan tujuan mengembangkan teori atau pola) atau sudut pandang advokasi/partisipatif yang mencakup politik, berfokus pada isu, kolaboratif, berorientasi pada perubahan, atau keduanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa dalam konteks tertentu yang alami dengan menggunakan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2013).

Analisis data adalah proses terencana yang dilakukan untuk mengurai dan mengolah data sehingga dapat diambil kesimpulannya. Bagian ini merupakan tahap krusial untuk menyaring dan mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat untuk penelitian. Analisis di sini melalui beberapa tahapan. Langkah pertama adalah memeriksa kualitas data yang diperoleh. Kedua, menganalisis data dengan memilih informasi yang relevan. Ketiga, mengembangkan tema dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh. Keempat, penafsiran dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari seluruh data. Data juga dikelompokkan menurut informan dan dikategorikan berdasarkan tema, kategori, serta dimensi informasi, lalu disajikan dalam gambaran mendalam mengenai subjek yang diteliti dalam bentuk narasi. Oleh karena itu, standar penulisan kalimat yang baik dan tepat juga merupakan salah satu variabel agar jurnal bisa terakreditasi dan layak dijadikan sebagai data referensi (Utomo, A. P. Y., et al., 2019).

Triangulasi data merupakan proses pemanfaatan lebih dari satu metode atau sumber informasi untuk menganalisis dan menafsirkan suatu fenomena atau kumpulan data. Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk memperbaiki ketepatan, keabsahan, dan tingkat pemahaman hasil analisis. Triangulasi data dimanfaatkan untuk menjamin keabsahan temuan yang dilakukan secara tematik. Pada dasarnya, triangulasi adalah pendekatan yang melibatkan berbagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berlandaskan pada fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, triangulasi adalah upaya untuk memverifikasi keakuratan data atau informasi dari beragam perspektif mengenai tindakan yang diambil oleh peneliti, metode yang digunakan adalah dengan mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas sebanyak mungkin yang muncul saat data dikumpulkan dan dianalisis (Alfansyur & Maryani, 2020, hal. 147).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Aksi Kamisan

Setelah tiga puluh dua tahun memimpin sebagai presiden, Soeharto akhirnya dapat dihapuskan dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Aksi mahasiswa Indonesia pada 1998 menjadi titik balik karena dianggap sukses menggulingkan Soeharto. Krisis ekonomi yang menyebabkan naiknya harga BBM dan ancaman putus sekolah menjadi pendorong gerakan mahasiswa. Aksi mimbar bebas meminta penurunan harga, khususnya untuk sembako, disertai dengan tuntutan terkait krisis ekonomi lainnya. Situasi Indonesia yang semakin tidak stabil memunculkan gerakan mahasiswa 1998 yang dikenal sebagai gerakan reformasi untuk mengembalikan Indonesia dengan pemimpin yang menjalankan pemerintahan secara demokratis.

Pengunduran Soeharto disertai oleh serangkaian peristiwa yang menyebabkan kekacauan di Indonesia. Selain menaikkan harga sembako, krisis ekonomi juga menyebabkan peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menyusutnya peluang kerja yang mendorong mahasiswa untuk berunjuk rasa atau melakukan aksi kepedulian. Saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar juga meroket sangat tinggi, yang semula hanya 2 ribu per dollar pada Juni 1997 menjadi lebih dari 16 ribu pada Juni 1998. Kenaikan pengangguran dari 4,68 juta pada tahun 1997 menjadi 5,46 juta pada tahun 1998. Keberhasilan ekonomi selama 30 tahun terakhir yang memberikan

legitimasi kepada Presiden Soeharto untuk tetap berkuasa akhirnya beralih menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Pada 4 Mei 1998, pemerintah mengumumkan pemotongan subsidi bahan bakar yang berdampak pada peningkatan harga BBM sebesar 70% dan secara tidak langsung meningkatkan tarif transportasi umum. Keputusan ini segera memicu kekacauan yang signifikan, seperti yang terlihat di kota Medan dengan tindakan penjarahan dan pembakaran yang terutama menasar keturunan non-pribumi.

Metode dan Strategi Aksi Kamisan

Jumlah korban yang terus bertambah akibat pelanggaran HAM di Indonesia menyebabkan duka yang mendalam bagi kerabat dan keluarga korban. Duka keluarga keluarga yang terabaikan akibat ketidakadilan dari pemerintah, menciptakan kesamaan sehingga mengajak mereka untuk membentuk komunitas antar keluarga korban yang ditinggalkan. Terdapat sejumlah paguyuban yang didirikan, seperti Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), Para Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia (JRKI), serta Jaringan Solidaritas Penyintas untuk Keadilan (JSKK). Ibu Wawan adalah Ibu Maria Katarina Sumarsih, adalah salah satu anggota Presidium dari paguyuban itu. Dia bersama Bedjo Untung (77 tahun), Dan Suciwati (57 tahun) menjadi anggota Presidium pertama JSKK yang didirikan pada 9 Agustus 2005. Paguyuban ini juga berfungsi sebagai wadah untuk saling mendukung dan membangun rasa solidaritas antar anggota. Di sisi lain, mereka juga membicarakan berbagai masalah terkait pelanggaran HAM.

Dalam aksi damai yang diadakan Aksi Kamisan, para aktivis dan keluarga korban memperlihatkan foto-foto korban pelanggaran HAM dan mengangkat tulisan "usut tuntas" yang menjadi simbol harapan bagi pemimpin negeri untuk menangani isu Hak Asasi Manusia. Selain menunjukkan foto-foto korban dan mengangkat spanduk berisi tuntutan mereka, peserta aksi Kamisan juga menyampaikan pidato publik yang memuat argumen, tuntutan, serta kekhawatiran mereka terhadap negara ini. Aksi Kamisan yang telah berlangsung selama 17 tahun, para pengunjuk rasa mengenakan atribut serba gelap seperti kaos dan payung. Warna hitam tersebut dipilih oleh Ibu Sumarsih karena melambangkan keteguhan duka cita mereka yang bertransformasi menjadi kasih sayang terhadap korban dan sesama. Payung melambangkan perlindungan, sedangkan istana presiden menjadi simbol kekuasaan.

Pemanfaatan media sosial dan platform digital dalam Aksi Kamisan dilakukan dengan membangun narasi yang kuat agar dapat menarik perhatian generasi muda untuk melanjutkan mobilisasi dukungannya kepada masyarakat. Bangkitnya empati publik, terciptanya solidaritas dan tergeraknya aksi-aksi kolektif baik di dunia nyata maupun dunia maya, terjadi dikarenakan adanya kampanye daring, unggahan foto maupun video serta cerita dari para korban dan keluarga mereka. Hal ini menjadikan aksi kamisan tidak hanya terjadi di satu daerah tetapi juga terjadi hampir di seluruh Indonesia dan menjadikan aksi kamisan ini dianggap sebagai suatu simbol perlawanan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah.

Dinamika Aksi Kamisan

Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia yang telah berlangsung selama 73 tahun, negara ini telah mengalami setiap tahap dinamika yang fluktuatif dalam berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan terutama politik. Dalam perjalanan Sejarah Indonesia, demokrasi telah mengalami berbagai perkembangan. Demokrasi sendiri pernah mengalami periode krisis pada era orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun (1966-1998). Pada Era Orde Baru ini, Soeharto menerapkan sistem Demokrasi Pancasila, yang mana prinsip-prinsip demokrasi mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi Pancasila justru menyimpang dari seharusnya, yang terbukti dengan banyaknya kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta pelanggaran HAM yang terjadi.

Terjadinya sejumlah pelanggaran HAM pada akhirnya melahirkan Aksi Kamisan, yang bertujuan pada nilai-nilai perjuangan bersama dari kegiatan mingguan yang hanya sekadar untuk menguatkan rasa solidaritas antara sesama korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat yang penyelidikan tersebut (dari sudut pandang politik) yang masih belum selesai sampai sekarang (Putra, 2016). Tindakan kamisan sendiri memiliki keunikan yang membedakannya dari aksi protes lainnya, yaitu terletak pada ketahanan kegiatan yang kuat, pelaku yang konsisten dari waktu ke waktu, keteraturan waktu yang berhubungan kelangsungan tindakan demonstrasi, konsistensi poin/persyaratan yang diperjuangkan di dalamnya serta metode/strategi dalam menyampaikan tuntutan (Putra, 2016). Aksi Kamisan ini tetap berlangsung sampai selama reformasi, namun menyedihkannya pergantian pemimpin republik Indonesia dari periode ke periode tidak menunjukkan sisi berpihak dalam proses penegakan HAM ke arah yang lebih serius (Adiwilaga, 2018).

Aksi Kamisan Sebagai Praktik Perlawanan Simbolik Terhadap Ketidak Adilan

Aksi Kamisan berperan penting dalam mendukung keadilan dan menambah pengetahuan publik tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Melalui pelaksanaan demonstrasi secara berkala setiap hari Kamis di depan Gedung Sate, aksi ini sukses menarik perhatian masyarakat (Perdana et al., 2024a) Makna Simbolik perlawanan terhadap Ketidakadilan mereka Adalah Menggunakan Pakaian serba hitam dan juga Membawa payung berwarna Hitam. Payung berwarna hitam Ini merupakan lambang utama Aksi Kamisan yang memiliki Makna Simbol Antara lain :

- **Kesedihan dan perlawanan** terhadap ketidakadilan
- **Perlindungan simbolik** untuk para korban pelanggaran hak asasi manusia
- **Keheningan yang berbicara**, sebab tindakan ini dilakukan tanpa pidato.

Simbol yang mendukung lainnya:

- **Pakaian seluruhnya berwarna hitam** → simbol duka atas pelanggaran HAM yang belum dituntaskan.
- **Berdiri tegak (tindakan tanpa suara)** → demonstrasi tenang dan berkelanjutan
- **Hari Kamis** → dilaksanakan setiap Kamis sejak pertama kali diadakan

Perlawanan simbolik mengacu pada jenis perlawanan yang tidak melibatkan kekerasan fisik, tetapi menggunakan simbol, gerakan, dan arti untuk menantang

struktur kekuasaan. Dalam Aksi Kamisan, simbol payung hitam, keheningan, dan konsistensi waktu berfungsi sebagai bahasa politik yang menyampaikan pesan kesedihan, perlawanan, dan permohonan keadilan. Simbol-simbol ini berfungsi sebagai sarana komunikasi moral yang menantang legitimasi negara ketika negara tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap korban pelanggaran HAM. Pelaksanaan Aksi Kamisan di kota-kota Jawa Barat, seperti Bandung, menggambarkan bagaimana ruang publik lokal dimanfaatkan sebagai arena untuk menyuarakan tuntutan keadilan. Tindakan ini kerap dilakukan di hadapan bangunan pemerintahan atau tempat simbolis negara, menegaskan bahwa tuntutan diarahkan langsung kepada pihak yang berkuasa.

Peserta Aksi Kamisan di Jawa Barat memiliki latar belakang yang beragam, mencakup keluarga penderita, aktivis hak asasi manusia, mahasiswa, seniman, serta masyarakat sipil umum. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Aksi Kamisan telah melebihi identitas korban saja dan berkembang menjadi gerakan kolektif yang berlandaskan solidaritas. Regenerasi anggota, khususnya di kalangan pemuda dan mahasiswa, merupakan dinamika yang krusial. Mereka menghadirkan bentuk-bentuk ekspresi baru melalui media sosial, poster visual, dan dokumentasi digital, tanpa mengurangi esensi simbolik dari Aksi Kamisan itu sendiri.

Di Jawa Barat, Aksi Kamisan berperan dalam melestarikan ingatan kolektif. Di tengah terbatasnya penyelesaian hukum dan narasi resmi negara yang cenderung mengabaikan kasus-kasus HAM, Aksi Kamisan menawarkan pengingat alternatif di ruang publik. Ingat ini menghadapi usaha pelupakan (*amnesia politik*) dan menegaskan bahwa keadilan belum terwujud. Dengan berdiri tenang sambil memegang tanda duka, peserta Aksi Kamisan menuntut masyarakat untuk mengingat sejarah kekerasan yang belum diselesaikan. Praktik ini menjadikan memori sebagai metode perlawanan itu sendiri. Aksi Kamisan di wilayah Jawa Barat menjadi bentuk perlawanan simbolis yang signifikan dalam konteks gerakan sosial di Indonesia. Melalui simbol-simbol, keheningan, dan ketekunan, Aksi Kamisan menentang ketidakadilan struktural dan kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM yang serius. Walaupun tidak membawa perubahan kebijakan secara langsung, Aksi Kamisan berfungsi sebagai pengingat bagi publik bahwa keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan itu sendiri.

Aksi Kamisan berhasil *meningkatkan kesadaran publik* tentang kasus pelanggaran HAM yang belum selesai dan *menarik perhatian media* terhadap isu tersebut (Andini et al., 2024). Demonstrasi rutin setiap Kamis di depan Istana Negara menciptakan momentum sehingga isu HAM tetap dibicarakan dalam diskursus publik walaupun dampaknya pada perubahan kebijakan masih terbatas. (Perdana et al., 2024b) Menjelaskan peran dan pengaruh aksi dalam advokasi keadilan korban pelanggaran HAM. Aksi Kamisan dinyatakan sebagai gerakan sosial damai yang masih relevan untuk mempertahankan ingatan kolektif tentang tragedi HAM dan menguatkan tuntutan penyelesaian. Penelitian ini juga mengulas bagaimana aksi ini berdampak pada kesadaran masyarakat akan HAM dan pentingnya dialog publik. Aksi Kamisan menunjukkan kontribusi dalam mengingatkan negara akan seriusnya tuntutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Aksi Kamisan lebih dikenal di Jakarta daripada di Kota Bandung. Ketika aksi ini diperkenalkan di Bandung, beberapa orang sudah mengenal Aksi Kamisan. Aksi Kamisan merupakan tindakan yang sederhana, tidak memerlukan banyak peserta, tidak memerlukan jeritan, dan tidak mengeluarkan biaya tinggi. Menurut Fajar (anggota Aksi Kamisan Bandung, Gedung Sate):

“...Aksi Kamisan ini tidak selalu dihadiri oleh banyak peserta, tetapi selama masih ada yang mau menggerakkan dan ikut serta, maka kegiatan ini akan terus berlangsung dengan simbol yang dipakai.” Suatu ketika, abang dan saya pernah menjalankan Kamisan hanya berdua dengan bang Pram, berdiri tegak di depan Gedung Sate mengenakan baju hitam, sambil membawa berbagai tulisan tuntutan HAM, dan kadang juga melakukan aksi menggunakan seni jalanan. (Wawancara, 27 November 2025)

Lebih lanjut Muthia (aktor sentral Aksi Kamisan) menyampaikan:

“...Aksi Kamisan ini memang tetap terfokus pada isu HAM berat di masa lalu, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang terbuka atau menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan yang mereka alami dengan memanfaatkan simbol-simbol yang ada pada aksi ini.” Sebagian besar orang sudah tahu tentang aksi ini, jadi ketika kita melakukan kegiatan seperti di Gedung Sate, sebagian masyarakat, terutama mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut, sudah familiar dengan Kamisan. (Wawancara, 27 November 2025)

Dokumentasi Kegiatan



DAFTAR PUSAKA

- Berlian Putri Syahda, N. V. (Maret -Agustus 2024). “Peran dan Dampak Aksi Kamisan dalam Memperjuangkan HAM di Indonesia”. *Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)*, Volume 5, No.2, 100-113.
- Maria Catarina Sumarsih, tokoh pemrakarsa Aksi Kamisan, 7 April 2025.
- Berlian Putri Syahda, N. V. (Maret -Agustus 2024). “Peran dan Dampak Aksi Kamisan dalam Memperjuangkan HAM di Indonesia”. *Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)*, Volume 5, No.2, 100-113.
- Prasetyo,S.(2023).Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 3(1),51-57
- Yudistira,A.,&Husodo,P.(2022).Jalanpanjangpencariankeadilan:AksiKamisanJakartatahun2007-2021.*JurnalCeterisParibus*,1(2),1-10.
- Andini, L. A., Fadiyah, D., & Nugroho, S. S. (2024). Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan. *Journal of Political Issues*, 6(1), 38-45. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.203>
- Asiah, N. (2018). HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 55-66. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>
- Perdana, F. R., Vania Sitinjak, N., Nurafiyani Wibisono, D., Luqman Fadlilah, M., & Abdurrahman, D. (2024a). Peran dan Dampak Aksi Kamisan dalam Memperjuangkan HAM di Indonesia. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 5(2), 100-113. <https://doi.org/10.33822/jpds.v5i2.10049>